

## **HAK INKGAR NOTARIS DALAM HAL PEMERIKSAAN PERKARA PERDATA DAN PIDANA MENURUT UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS DAN KODE ETIK NOTARIS**

Oleh Agus hindrabuana<sup>1</sup>, Sutanto<sup>2</sup>

### **INTISARI**

Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis Hak Ingkar Notaris dalam hal pemeriksaan perkara perdata dan pidana dalam proses penyelidikan dan penyidikan sampai dengan di persidangan didasarkan pada undang-undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum. Prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan ( statute approach ) peneliti perlu memahami hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan, lokasi penelitian adalah di Perpustakaan. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan studi kasus. Adapun teknik analisis data dilakukan secara kualitatif.

Hak ingkar notaris sebenarnya tidak hanya dalam Pasal 66 ayat (1) UUDN.diatur juga dalam Pasal 4, Pasal 16 dan Pasal 54 UUDN maka jelas bahwa untuk merahasiakan isi akta beserta hal-hal yang diberitahukan kepada notaris sehubungan dengan pembuatan akta tersebut adalah merupakan suatu kewajiban jabatan notaris, sehingga dengan demikian untuk mengundurkan diri sebagai saksi atau menolak untuk memberikan keterangan sebagai saksi bukan hanya merupakan hak tapi juga merupakan suatu kewajiban bagi notaris. Jadi notaris tidak hanya mempunyai hak ingkar (*verschoningsrecht*) akan tetapi juga mempunyai kewajiban ingkar (*verschoningsplicht*). Urgensi hak ingkar Notaris dalam prakteknya dilaksanakan atas dasar sumpah jabatan Notaris berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Apabila dikaitkan dengan pengecualian yang kontradiktif dengan Undang-Undang Jabatan Notaris, maka hak ingkar Notaris gugur sejauh diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lain karena adanya kepentingan hukum yang lebih tinggi dibandingkan kepentingan personal

**Kata Kunci:** *Notaris, Hak Ingkar, pemeriksaan perdata dan pidana, Kode etik*

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada

<sup>2</sup> Dosen Fakultas Hukum program pascasarjana Universitas Gadjah Mada

## THE RIGHT OF NOTARY IN THE CASE OF PERIOD AND CRIMINAL CYCLE BY LAW NOTARIS NOTE AND NOTE CODE ETHICS

Agus Hindra Buana<sup>3</sup>, Sutanto<sup>4</sup>

### ABSTRACT

*The purpose of this study is to know and examine the urgency of the arrangement of secret of office to the notarization rights in the case of examination of civil and criminal case according to the Notary Law and Notary Code; As well as the exclusion of the notarial rights in the examination of civil and criminal cases.*

*This research is normative law research. The approach used in this study is the approach of legislation (statute approach). In this study using the principle of deduction logic is to draw the conclusion of a problem that is general to the concrete problems faced.*

*The results of this study are: (1) The regulation on the right of disobedience to the notary's office is in the oath of Notary's office ordering to conceal the contents of the deed as regulated in Article 4 and Article 16 letter f of Law Number 2 Year 2014 concerning Amendment to Law Number 30 of 2004, it is also regulated in Article 322 paragraph (1) of the Criminal Code. The Second Article shall not apply if the other Law instructs to disclose the secrets and give the statement / statement to the party requesting it. Based on Article 16 paragraph (1) sub-paragraph e and Article 54 UUJN, in the last sentence it says "... unless the law otherwise provides." The notarization rights set forth in the UUJN are not absolute, since it is still possible if other laws are ordered; And (2) The use of this Right of Attorney does not necessarily apply immediately, but makes a letter of application to a judge who has tried and / or verified that a Notary will use his / her rights. Furthermore the Judge will decide to refuse or grant the request. If granted, the Notary does not need to testify. The use of such rights when a Notary as a witness in a court hearing does not necessarily mean that it is immediately applicable. But if a notary will use his / her right of reply, shall come and fulfill the summons and shall make a letter of appeal to the judge who is adjudicating / examining the case, that the Notary will use his / her rights. At the request of a Notary, the Judge who examines the case concerned shall determine whether to grant or deny the Notary's request. If a judge grants the Notary's request, the notary does not need to testify. But if the judge rejects the Notary's request, then the Notary needs to testify.*

**Key Words:** *Notary's Notary Rights, Civil and Criminal Procedures, Notary Position Law, Notary Code of Conduct*

---

<sup>3</sup> Student Master Of Notary, Faculty of Law, Gadjah Mada University.

<sup>4</sup> Lecture, Master Of Notary, Fakultas of Law Gadjah Mada University.